

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESENJANGAN
EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2015-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana S1 Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

FARAH LUTHFIYAH

NPM : 1751010188

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESENJANGAN
EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2015-2021**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan
Gelara Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi
dan Bisnis Islam

Oleh

FARAH LUTHFIYAH

NPM. 1751010188

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Kesenjangan antar daerah terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah belum banyak membawa hasil yang signifikan. Bahkan yang sering terjadi adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi justru dapat menambah kesenjangan baik terhadap distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Apa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021? 2. Apa Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021? 3. Apa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021? 4. Apa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021? 5. Bagaimana Kesenjangan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan Ekonomi dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode 2015-2021 yang diperoleh dari lembaga atau instansi pemerintah terkait penelitian ini. Data dalam penelitian ini meliputi data Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan ekonomi tenaga kerja berpengaruh dan signifikan terhadap Kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kesenjangan ekonomi di

Provinsi Lampung. Dari uji f (simultan) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan Pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Ekonomi, Prespektif Ekonomi Islam



ABSTRACT

Inequalities between regions occur as a consequence of concentrated development. Various programs developed to bridge the gap in both income distribution inequality and regional inequality have not brought significant results. In fact, what often happens is development policies carried out to encourage economic growth but can actually add to the gap in both income distribution and regional inequality. The problems raised in this study are: 1. What is the Effect of Government Spending on Economic Inequality in Lampung Province in 2015-2021? 2. What is the Effect of Manpower on Economic Inequality in Lampung Province in 2015-2021? 3. What is the Impact of Economic Growth on Economic Inequality in Lampung Province in 2015-2021? 4. What is the Effect of Government Spending, Labor and Economic Growth on Economic Inequality in Islamic Economic Perspective in Lampung Province in 2015-2021? 5. What is the Economic Gap in the Islamic Economic Perspective?

This study aims to determine the Effect of Government Spending, Labor and Economic Growth on Economic Inequality seen from an Islamic Economic Perspective in Lampung Province in 2015-2021. This research uses quantitative descriptive methods and uses data collection techniques, literature studies, and documentation. The data used are secondary data with the period 2015-2021 obtained from government institutions or agencies related to this research. The data in this study includes data on Government Expenditure, Labor, Economic Growth and Economic Inequality in Lampung Province.

The results showed that government spending has a positive and significant influence on the economic gap of labor has an effect and significant on economic inequality in Lampung Province and economic growth has a negative and significant effect on economic inequality in Lampung Province. From the f test (simultaneous) shows that government expenditure, labor and economic growth together have a significant effect on economic inequality in Lampung Province.

***Keywords: Government Spending, Labor, Economic Growth,
Economic Inequality, Islamic Economic Perspective***



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Luthfiyah
NPM : 1751010188
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESENJANGAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-2021”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun..

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Desember 2023
Penulis,



Farah Luthfiyah
NPM. 1751010188



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Lektol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

Judul Skripsi : **PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH,
TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KESNIANGAN
EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-
2021**

Nama : Farah Luthfiyah
NPM : 1751010188
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev
NIP. 197809182005012005

Pembimbing II

Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy
NIP. 2013011091989841028163

Ketua Jurusan,

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Lektol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESENJANGAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-2021" disusun oleh, Farah Luthfiah, NPM : 17510101848, program studi Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis, 07 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua	: Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Anggun Okta Fitri, M.M	(.....)
Penguji I	: Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt	(.....)
Penguji II	: Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suvanto., M.M., Akt., CA

NIP. 197009262008011008

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang bukan hanya semata-mata usaha penulis sendiri, melainkan dengan bantuan tulus serta dukungan moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Ibu Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev selaku pembimbing utama yang meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi masukan serta arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy selaku pembimbing dua yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam untuk ilmu, nasihat, serta arahan yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Orang tua tercinta, Bapak Misrol dan Ibu Indah Prihatin yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus, memberikan semangat, dukungan moril serta materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kedua adik saya Najwa Dzakhirah dan Muhammad Ghalib Al Ghifari serta seluruh keluarga kakek Alm. Hanafi dan kakek Alm. Imam Asmui yang secara tidak langsung menjadikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya kelas A , terimakasih untuk semua kebersamaan, kenangan, dan solidaritasnya dari masa perkuliahan sampai saat ini.
7. Sahabat terbaik dari kecil Puput, teman teman seperjuangan Herlina, Imeh, Ajeng dan Ayu serta tim Uinagakure serta sahabat SMA Jati, Yuli dan Ririn yang tidak bosan untuk memberikan semangat dan nasehat disela-sela kesibukan pekerjaannya.
8. Terimakasih kepada TREASURE yang telah menjadi penyemangat dan tidak langsung memberikan motivasi dan dukungan lewat karya-karya lagu indahnyanya serta kuotes dan kata-kata penyemangat

yang diberikan kepada Teume. Salah satunya yang terus penulis ingat "Jangan menyerah, Kamu sudah merasakan kesakitan jalani hingga mendapat hasil yang baik". Park Jihoon Treasure

9. Dan yang terakhir untuk perempuan membawa kabar kebahagiaan, kesenangan dan kegembiraan yang berhati dan berjiwa lemah lembut, untuk diriku sendiri Farah Luthfiyah. Terimakasih sudah bekerja keras dan berusaha keras sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah menyerah sesulit dan sesusah apapun selama proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Bandar Lampung, 07 Desember 2023

Yang Membuat,

Farah Luthfiyah



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Farah Luthfiyah yang dilahirkan di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 Maret 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari Bapak Misrol dan Ibu Indah Prihatin.

Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-Kanak TK Ceria abadi Kalianda selama 2 tahun, dan selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di Al Kautsar Bandar Lampung, pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah tingkat menengah pertama di Al Kautsar Bandar Lampung di tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014, dan sampai pada sekolah menengah atas yang dilanjutkan juga di Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2014 dan selesai di tahun 2017.

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah dan rasa syukur tiada terkira, serta dengan dukungan dan dorongan moril maupun materil yang telah diberikan orang tua, pada tahun 2017 penulis berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 07 Desember 2023
Yang Membuat,

Farah Luthfiyah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2021” dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju masa yang penuh dengan keilmuan.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan pastilah masih banyak terdapat kesalahan, serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari pihak-pihak terkait. Dengan ini maka penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M , Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
4. Vitria Susanti, M.A.,M.Ec.Dev selaku pembimbing I, dan Okta Supriyaningsih,S.E.,M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memeberikan semangat, motivasi, serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 07 Desember 2023

Farah Luthfiyah
NPM. 1751010188

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDULii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judu	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13.....
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13.....
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan.....	19
1. Pengeluaran Pemerintah	19
a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah	19
b. Teori Pengeluaran Pemerintah	21
c. Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam	23

2.	Tenaga Kerja	25
a.	Pengertian Tenaga Kerja	25
b.	Teori Tenaga Kerja	26
c.	Tenaga Kerja Dalam Prespektif Islam.....	30
3.	Pertumbuhan Ekonomi	31
a.	Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	31
b.	Teori Pertumbuhan ekonomi	32
c.	Pertumbuhan ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.....	35
4.	Kesenjangan Ekonomi	37
a.	Definisi Kesenjangan Ekonomi	37
b.	Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah	38
c.	Kesenjangan Ekonomi Dalam Prespektif Islam.....	39
B.	Pengajuan Hipotesis.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Waktu dan Tempat Penelitian	49
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
C.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	49
D.	Definisi Operasional Variabel.....	50
E.	Instrumen Penelitian.....	52
F.	Metode Analisis Data	52
G.	Uji Hipotesis	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Data	58
1.	Pengeluaran Pemerintah	58
2.	Tenaga Kerja	59
3.	Pertumbuhan Ekonomi	61
4.	Kesenjangan Ekonomi	62
B.	Analisis Data	63
1.	Uji Prasarat Analisis	63
2.	Uji Regresi Linear Berganda.....	67
3.	Uji Hipotesis	69
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
1.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah	

terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung	73
2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung	76
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung	78
4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021	82
5. Kesenjangan Ekonomi dilihat dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	83
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	86
B. Rekomendasi	87
 DAFTAR RUJUKAN	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1.1 PDRB di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021	56
3.1 Definisi Operasional Variabel	48
4.1 Pengeluaran Pemerintah Tahun 2015-2021	58
4.2 Penduduk Usia 15+ yang Bekerja (Jiwa) Tahun 2015-2021	57
4.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2021	58
4.4 Kesenjangan Ekonomi Tahun 2015-2021	59
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	61
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
4.7 Hasil Uji Autokorelasi	63
4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	64
4.9 Uji Signifikansi Parsial	66



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1.1 Grafik Data Gini Ratio Provinsi Lampung Tahun 2015-2021	4
1.2 Grafik Realisasi Total Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021	5
1.3 Penduduk Usia 15+ yang Bekerja (Jiwa) Tahun 2015-2021 .	8
1.4 Hasil Uji Normalitas	60



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran	
Lampiran 1. Data Gini Ratio Provinsi Lampung Tahun 2015-2021.....	88
Lampiran 2. Data Realisasi Total Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021	89
Lampiran 3. Data Penduduk Usia 15+ yang Bekerja (Jiwa)Tahun 2015-2021	90
Lampiran 4. Data Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021.....	91
Lampiran 5. Output Eviews 10.....	92



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan mencegah timbulnya berbagai penafsiran mengenai judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021”**. Maka penelitian perlu membatasi istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut, adapun pembatasan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah suatu proses interaksi yang menentukan tingkah laku seseorang atau kelompok remaja, baik dalam arti positif, yaitu terjadinya suatu penyesuaian maupun dalam arti negatif, yaitu terjadinya satu bentuk tingkah laku yang tidak sesuai bagi kepentingan bangsa atau dengan suatu sistem nilai karena meniru suatu kelompok tertentu yang terdapat dalam lingkungan sosialnya, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara.¹
2. Pengeluaran Pemerintah adalah Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.²
3. Pertumbuhan Ekonomi adalah keadaan dimana terjadi kenaikan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto pada suatu negara atau daerah tanpa melihat. apakah kenaikan

¹ Jusuf Amir Faesal, *Riorientasi pendidikan islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

² Merri Anitasari, Ahmad Soleh, *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu”*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 3 No. 2 (2012): 112-127, htt Alam S., *Ekonomi*, (Jakarta: Essis, 2007), h. 25

tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.³

4. Tenaga Kerja adalah penduduk yang dapat bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan sanggup bekerja.⁴
5. Kesenjangan Ekonomi adalah jurang perbedaan antara mereka yang kaya (pendapatan tinggi) dan mereka yang miskin (pendapatan rendah).⁵

Dari uraian istilah-istilah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa maksud dari proposal skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021.

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur perekonomian. Yakni perubahan landasan kegiatan ekonomi dan kerangka susunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, antara perubahan struktur dan pertumbuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat.⁶

Salah satu indikator pokok dalam mengukur Keberhasilan pembangunan suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, lalu menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi itu sendiri artinya adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun.⁷ Ini berarti bahwa untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dari tahun

³ Alam S., *Ekonomi*, (Jakarta: Essis, 2007), h. 25

⁴ Drs. Bambang Prishardoyo, *M. Si., Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 41

⁵ Mudrajat Kuncoro, *Indikator Ekonomi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 97

⁶ Djojohadikusumo, Soemitro.1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.d

⁷ Sukirno, Sadono 2007, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta. Kencana

ke tahun. Indikator yang digunakan adalah PDRB, masing-masing daerah kabupaten/kota kita dapat mengetahui seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya, dengan kata lain pemerataan pendapatan. Provinsi Lampung memiliki tiga belas (14) kabupaten dan dua (2) kota.

Selain pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi (*income inequality*) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris bukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Kesenjangan ekonomi berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi kesenjangan ekonomi berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin).

Kesenjangan didefinisikan sebagai kondisi ketidakadilan. Kondisi ketika beberapa orang atau kelompok memiliki hak dan kesempatan lebih baik dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Biasanya, kondisi ini terjadi dalam sebuah pertandingan antara dua titik ekstrim: kaya dan miskin, mampu dan tidak mampu, serta punya kesempatan dan tidak memiliki kesempatan. Kesenjangan adalah sebuah perbandingan jarak diantara kedua titik ekstrem tersebut.

Setiap daerah dalam melaksanakan pembangunannya mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi akibat adanya pendapatan yang meningkat.

Pada kenyataannya di lapangan tidak pernah tercapai pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan beberapa hal antara lain masalah-masalah internal seperti adanya kesenjangan antar manusia, kesenjangan antar daerah dan kesenjangan ekonomi, sedangkan masalah eksternal misalnya persaingan antar wilayah, baik antar wilayah regional maupun nasional.

Alisjahbana dalam Noegroho Soelistianingsih, mengatakan bahwa ketimpangan juga sering terjadi secara nyata antara daerah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi itu sendiri.

Kesenjangan antar daerah terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah belum banyak membawa hasil yang signifikan. Bahkan yang sering terjadi adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi justru dapat menambah kesenjangan baik terhadap distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah.⁸

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah.

Di era otonomi daerah sekarang ini, di mana setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan disertai pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Provinsi Lampung sebagai bagian dari perekonomian nasional, dan mempunyai struktur ekonomi yang relatif sama maka strategi dan kebijakan pembangunan yang harus diterapkan pun relatif sama. Permasalahan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi salah satu permasalahan yang harus di cari solusinya, hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu misi Provinsi Lampung “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”.⁹

Kesenjangan atau ketimpangan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan.¹⁰

⁸ Maryam Yuliani, "Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan". Skripsi Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro, 2010. H.4

⁹ Kalalo, T., Engka, D. S. M., & Maramis, M. T. B. (2016). *Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(01), 818–830.

¹⁰ Baidhawry, Z. (2015). *Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal*. In LP2M IAIN Salatiga.

Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebaradi negara-negara berkembang.¹¹ Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang.¹²

Bank Indonesia mengemukakan bahwa Kesenjangan pendapatan penduduk miskin semakin berkurang dengan menurunnya Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Aspek kesenjangan ekonomi dan indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antara lain dengan melihat Indeks Gini (Gini Ratio).

Tabel.1.1
Data Gini Ratio Provinsi Lampung
Tahun 2015-2021

Wilayah	Gini Ratio Kabupaten/Kota	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat		0.345	0.33	0.291	0.314	0.296	0.295	0.281
Tanggamus		0.326	0.329	0.305	0.289	0.314	0.293	0.265
Lampung Selatan		0.348	0.346	0.3	0.353	0.331	0.299	0.268
Lampung Timur		0.38	0.325	0.295	0.346	0.302	0.315	0.284
Lampung Tengah		0.367	0.343	0.308	0.315	0.308	0.304	0.291
Lampung Utara		0.322	0.386	0.309	0.311	0.309	0.301	0.275
Way Kanan		0.355	0.309	0.306	0.307	0.299	0.311	0.283
Tulang Bawang		0.362	0.314	0.327	0.352	0.322	0.279	0.292
Pesawaran		0.327	0.316	0.291	0.316	0.31	0.288	0.299
Pringsewu		0.348	0.408	0.304	0.318	0.295	0.31	0.277
Mesuji		0.314	0.337	0.276	0.29	0.286	0.308	0.272
Tulang Bawang Barat		0.346	0.307	0.285	0.316	0.316	0.272	0.282
Pesisir Barat		0.299	0.364	0.34	0.335	0.33	0.281	0.322
Bandar Lampung		0.4	0.376	0.349	0.342	0.316	0.359	0.344
Metro		0.408	0.381	0.373	0.334	0.342	0.299	0.309
Provinsi Lampung		0.376	0.364	0.334	0.346	0.329	0.327	0.323

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

¹¹ Jhingan, M. L. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada.

¹² Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh*. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 1(2), 196–210.

Berdasarkan data diatas indeks gini ratio Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, Pada tahun 2015 sebesar 0.37% dengan wilayah gini ratio terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 0.29% dan terbesar pada Kota Metro sebesar 0.40%. Tahun 2016 sebesar 0.36% dengan wilayah gini ratio terendah pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0.30% sedangkan wilayah terbesar Kabupaten Pringsewu sebesar 0.40%. Pada tahun 2017 sebesar 0.33% dengan wilayah gini ratio terendah di Kabupaten Mesuji sebesar 0.27% dan terbesar berada di Kota Metro sebesar 0.37%. Pada tahun 2018 sebesar 0.34% dengan terendah berada di Kabupaten Tanggamus sebesar 0.28% dan terbesar berada di Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2019 sebesar 0.32% dengan wilayah gini ratio terendah berada di Kabupaten Mesuji sebesar 0.28% dan terbesar pada Kota Metro sebesar 0.34%. Pada tahun 2020 sebesar 0.32% dengan wilayah gini ratio terendah berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0.27% dan terbesar pada Kota Bandar Lampung sebesar 0.35%. Pada tahun 2021 sebesar 0.32% dengan wilayah gini ratio terendah berada di Kabupaten Tanggamus sebesar 0.26% dan terbesar pada Kota Bandar Lampung sebesar 0.34%.

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Pengeluaran Pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi.¹³ Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada : a. Pajak yang diharapkan akan diterima; b. Pertimbangan politik; dan c. Permasalahan yang dihadapi.¹⁴

¹³ Sukirno, ,2002. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

¹⁴ Samuelson, Paul A dan William D.Nordhaus.1996. *Makro Ekonomi* (terjemahan). Edisi keempat belas, Erlangga,Jakarta.

Tabel.1.2
Realisasi Total Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Lampung
Tahun 2015-2021

No	Jenis Pengeluaran	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	9334799715	11124093630	12965997147	11094229671	12264786554	12751846389	12324229884
1	Belanja Pegawai	7934504197	8579016863	8666484631	7871507930	8225282935	8117017138	8006756019
2	Belanja Bunga	4971683	7927385.68	26372576.19	30723992.97	28788772.66	8083238.34	28665522.61
3	Belanja Subsidi	1639996.6	1593067.31	1598196.7	589851	1800000	1000000	1000000
4	Belanja Hibah	360960804.7	320601435.3	323796768.2	405033569.7	390938966.4	709607993.7	480660385.1
5	Belanja Bantuan Sosial	50597616.3	43947430.63	37688875	70055893.5	77095659.27	64342984.09	113104520.9
6	Belanja Bagi Hasil	2080430.12	9876687.9	845132410.7	236391367.8	37316577.64	42509853.72	51751730.76
7	Belanja Bantuan Keuangan	974399797.3	2153772085	3057209801	2455676818	3491812670	3553507002	3554068131
8	Pengeluaran Tidak Terduga	5645190.31	7358674.8	7713888.32	24250248.45	11750972.86	255778178.6	88223574.05
B	Belanja Langsung	7700893681	8601109203	9699427529	10192152093	9797098896	9023063344	8814183427
1	Belanja Pegawai	806313132.1	649287641.5	318965217.2	1090118059	1208103732	1834073505	459693598.6
2	Belanja Barang dan Jasa	3091197730	3302765658	4283357304	4621824478	5075076393	4476133493	5397841291
3	Belanja Modal	3803382820	4649055903	5097105008	4480209557	3513918770	2712856345	2956648538
C	Pembiayaan Daerah	747668896.1	61520028	80835274.35	26076854	38962956.48	31251996.91	75133432.71
	Jumlah Total	34071386793	39450405665	45330849351	42572763528	44123770898	43549819465	42276826623

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Data statistik Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2015-2021 menunjukkan perkembangan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sebesar 34.071.386.793 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 45.330.849.351, kemudian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 42.572.763.528 pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 44.123.770.898 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 sebesar 42.276.826.623.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.¹⁵ Proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Beberapa perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktivitas pertanian kerah sektor non pertanian dan

¹⁵ Sukirno, S. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

sektor industri ke sektor jasa.¹⁶ Indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah PDRB. PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut tabel PDRB perkapita Provinsi Lampung tahun 2015-2021.

Tabel.1.3
PDRB di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Lampung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	13948733	14519118	15117157	15767211	16439504	16311641	16691464
Tanggamus	15525671	16147948	16805729	17470686	18154634	16723989	16916481
Lampung Selatan	25349795	26394450	27558977	28732183	29891130	28005367	28497195
Lampung Timur	24932145	25816544	26774727	27539249	28313977	26111509	25936870
Lampung Tengah	31292006	32746767	34171318	35748301	37296029	32552298	32970220
Lampung Utara	22205934	23216181	24314176	25501106	26735172	25705376	26379819
Way Kanan	18092261	18818793	19583312	20410044	21242821	20022703	20417471
Tulang Bawang	29827876	31037980	32330700	33699755	35041182	36317711	37300970
Pesawaran	21971872	22828152	23718194	24679039	25630113	23645335	23857801
Pringsewu	16430958	17100097	17818432	18558210	19325688	18877941	19345420
Mesuji	29211811	30510945	31907614	33419076	34954161	30470823	30932026
Tulang Bawang Barat	24063892	25117294	26296663	27524491	28712977	27115559	27704508
Pesisir Barat	16818258	17546288	18330637	19159038	20042907	18899297	19146727
Bandar Lampung	31526570	32933858	34374182	35876747	37387261	33305748	33603217
Metro	21803196	22757976	23715212	24727590	25709051	25156671	25670636
Provinsi Lampung	24581783	25568571	26614816	27741245	28894502	26743751	27197459

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan data diatas PDRB Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan dan penurunan, Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 tahun 2015 sebesar 24.581.783 pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 25.568.571 hingga tahun 2019 sebesar 28.894.502 pada thun 2020 mengalami penurunan sebesar 26.743.751 tahun 2021 meningkat kembali sebesar 27.197.459 dengan wilayah pdrb terendah pada Kabupaten Lampung Barat sebesar 16.691.464 dan pdrb tertinggi di Kota Bandar Lampung sebesar 33.603.217 ini menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pada

¹⁶ Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi. Edisi ketujuh Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kota Bandar Lampung cukup besar. Kota Bandar Lampung tidak dipungkiri bahwa merupakan ibu Kota Provinsi Lampung dan pusat-pusat perekonomian.

Perkembangan ekonomi pada Provinsi Lampung ditunjukkan dari melalui nilai PDRB dari Tahun ke Tahun. PDRB menggambarkan produktivitas dari suatu daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi. PDRB dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa dan seluruh kegiatan ekonomi yang ada, semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan maka semakin besar pula pendapatan daerah yang dihasilkan.

Perekonomian suatu daerah yang tumbuh dengan tinggi akan memperbesar daya serap tenaga kerja serta mampu digunakan untuk mengurai jumlah pengangguran yang ada. banyak atau sedikit jumlah tenaga kerja yang ada akan berpengaruh terhadap besar kecilnya angka kesenjangan ekonomi perekonomian di suatu daerah. Semakin banyak jumlah orang yang bekerja di suatu wilayah, maka akan menyebabkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tinggi dan semakin optimal. Berdasarkan jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan pada setiap tahunnya maka pengangguran akan semakin banyak apabila angka pertumbuhan angkatan kerja tinggi sedangkan lapangan pekerjaan tidak sebanding. Adanya tenaga kerja maka akan menjadi salah satu indikator meningkatnya keberhasilan pembangunan suatu wilayah.¹⁷

¹⁷ Purwo Nugroho “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan Demak Tahun 2008-2010*”.(Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Diponegoro, 2014). H.12

Tabel.1.3
Penduduk Usia 15+ yang Bekerja (Jiwa)
Tahun 2015-2021

Tahun	Tenaga Kerja
2015	943585
2016	995645
2017	973128
2018	1015088
2019	1030461
2020	1086545
2021	1088031

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Pada tabel tenaga kerja berfluktuatif pada Tahun 2015 sampai pada Tahun 2021 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan pada Tahun 2015 tenaga kerja sebesar 943585 dan mengalami penurunan pada Tahun 2017 sebesar 973128 tahun berikutnya mengalami kenaikan terus menurun. Tabel diatas dapat menggambarkan keadaan tenaga kerja di Provinsi Lampung yang cenderung berfluktuatif. Penduduk yang bekerja terus meningkat setiap tahunnya hal tersebut menggambarkan penduduk usia kerja meningkat sedangkan angkatan kerja dan pengangguran berfluktuatif hal ini menyebabkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Provinsi lampung. Keadaan tenaga kerja di provinsi lampung belum bisa memberikan kontribusi secara signifikan dikarenakan jumlah penduduk usia kerja terus meningkat dan jumlah pengangguran berfluktuatif. Kondisi ini menggambarkan keadaan tenaga kerja di Provinsi Lampung belum bisa memperbaiki kesenjangan/ketimpangan.

Dalam pandangan sistem ekonomi islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya kesenjangan ekonomi. Kesejahteraan rakyat akan terwujud, karena politik ekonomi islam adalah menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat bisa terpenuhi.

Pemerintah daerah mesti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keaman). Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, kewajiban itu beralih kepada kerabatnya mulai yang terdekat. Jika tidak mencukupi diambilkan dari harta zakat yang didapat dari kaum muslimin atau masyarakat lainnya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*(QS.Al-Isra:26).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT mewajibkan zakat bagi umat islam untuk mensejahterakan dirinya, karena Allah menjamin orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tidak akan pernah mengalami kesusuhan. Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa ajaran islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Dari penjelasan latar belakang diatas, bahwasannya secara teoritis dan berdasarkan data yang telah diperoleh maka dengan demikian penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Uraian diatas penulis mengambil judul

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2021”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan indentifikasi masalahnya adalah:

- a. Pengeluaran Pemerintah menimbulkan efek cukup besar alokasi, distribusi dan stabilitas.
- b. Tenaga Kerja berpengaruh terhadap peningkatan dan menurunnya angka kesenjangan ekonomi.
- c. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami kenaikan dan penurunan.
- d. Kesenjangan ekonomi merupakan suatu aspek yang umum terjadi di setiap negara baik negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju memiliki masalah Kesenjangan ekonomi antar wilayah/daerah maupun dengan ukuran yang berbeda-beda.

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian dapat berfokus kepada ruang lingkup penelitian yang tidak meluas. Penelitian lebih fokus untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan dan menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan indentifikasi masalah, penelitian membatasi masalah Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021?
2. Apa Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021?

3. Apa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021?
4. Apa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021?
5. Bagaimana Kesenjangan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2015-2021.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2015-2021.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2015-2021.
4. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021.
5. Untuk mengkaji dan mengetahui Kesenjangan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Provinsi Lampung. Bagi akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Lampung.

- b. Secara Praktis, Bagi pemerintah/instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki ketidak merataan distribusi pendapatan yang telah ada di Provinsi Lampung. Bagi Masyarakat, agar dapat memperoleh informasi tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pengaruhnya terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Kesenjangan Ekonomi. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Sri Danawati, IK.G. Bendesa dan Made Suyana Utama (2016) ¹⁸	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta Kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali
2	I Gusti Ayu Putri Wahyuni,	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas

¹⁸ Sri Danawati, IK.G. Bendesa dan Made Suyana Utama,” *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016*” , E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.5 No7(2016) h. 28

	Made Sukasa dan Nyoman Yuliasmi (2014) ¹⁹	Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014	mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta Kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali
3	I Komang Oka Artana Yasa dan Sudarsana Arka ²⁰	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali	Hasil analisis Disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
4	Sri Wahyuni dan Devi Andriyani ²¹	Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh	Hasil Variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh
5	Muhammad Nasir (2015) ²²	Analisis Pertumbuhan ekonomi dan	Hasil perhitungan koefisien korelasi berpengaruh positif

¹⁹ I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukasa dan Nyoman Yuliasmi, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014", E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.3 No8 (2014) h. 7

²⁰ I Komang Oka Artana Yasa dan Sudarsana Arka, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali", Vol. 8 No.1, (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 2015), h. 70

²¹ Sri Wahyuni dan Devi Andriyani, "Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh", Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 05 No. 1 (2022).

²² Muhammad Nasir, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan tingkat Pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di

		pembagian ketimpangan Pendapatan di Kota Metro (2004-2011)	karena, meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum memperbaiki ketimpangan pendapatan.
6	Ayu Sriwahyuni ²³	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau Tahun 2005-2019	hasil Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Riau miskin berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi yang berarti semakin meningkat pengangguran dan kemiskinan akan meningkatkan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa persamaan, persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel Y yaitu Kesenjangan ekonomi tetapi terdapat perbedaan dalam variabel X yang akan diteliti. Perbedaan selanjutnya adalah objek penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya bukan di Provinsi Lampung melainkan di daerah lain. Kemudian variabel bebas yang mempengaruhi Kesenjangan ekonomi, dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu Pengeluaran Pemerintah, tenaga Kerja dan Pertumbuhan ekonomi. Rentan waktu yang digunakan penulis yaitu periode 2015-2021 dan penulis juga mencantumkan

Indonesia tahun 2009-2011”, Skripsi Ekonomi Pembangunan, (Universitas Lampung, Lampung, 2013), h. 51

²³ Ayu Sriwahyuni, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau Tahun 2005-2019*”, (Universitas Islam Riau, 2020).

perspektif ekonomi islam dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini tidak hanya Dilihat dari sudut pandang konvensional akan tetapi Dilihat dari sudut pandang ekonomi islam yang bersumber dari Al-Qur'an Dan Hadis.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, dengan ini maka diperlukan penjabaran sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal terdapat sampul depan, halaman sampul, abstrak, penyertaan orisinalitas, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama/Inti Skripsi

Bagian utama terdiri dari beberapa bab dan sub bab yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan

b. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini meliputi :

- 1) Teori yang digunakan, yang berisi tentang pembahasan tentang pengeluaran pemerintah, pendidikan, investasi, dan pengangguran
- 2) Pengajuan hipotesis

c. BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, bab metode penelitian meliputi : waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji regresi linier berganda, pemilihan estimasi model data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdapat deskripsi data, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

e. **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisis kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat menggambarkan masalah serta hasil yang terdapat pada penelitian ini. Sedangkan saran berisikan gagasan untuk menyelesaikan masalah dan kelemahan yang ada setelah dilakukannya penelitian ini.

3. **Bagian Akhir**

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah daftar rujukan dan lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Dalam Penelitian ini menggunakan *Stakeholder Theory*. Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* mendefinisikan *stakeholder* sebagai “any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.” bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik, sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.²⁴

Tabel 2.1.
Stakeholder Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Stakeholder Sektor Publik	Stakeholder Sektor Swasta
Stakeholder Eksternal	Stakeholder Eksternal
a. Masyarakat pengguna jasa publik	a. Bank sebagai kreditur
b. Masyarakat membayar pajak	b. Serikat buruh
c. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan sebagai input atas aktivitas organisasi	c. Pemasok
	d. Pemerintah
	e. Distributor
	f. Pelanggan
	g. Serikat dagang
	h. Pasar modal

²⁴ Horisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). *Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. Journal of Cleaner Production*, 275.

<ul style="list-style-type: none"> d. Bank sebagai kreditur pemerintah e. Badan badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB dsb f. Investor asing dan <i>country anlysis</i> 	
Stakeholder Internal	Stakeholder Internal
<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga negara (cabinet MPR, DPR) dsb b. Kelompok politik (partai politik) c. Menajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD d. Pegawai Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen b. Karyawan c. Pemegang saham

Stakeholder ialah suatu individu, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauhmana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang - Undang Dasar 2006 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.²⁵

²⁵ Harmoni, A. (2013). *Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia*. *International Conference on Eurasian Economies* 2013, 40, 204–210.

2. Pengeluaran Pemerintah

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan daerah.

Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud dalam rician belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dantunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Belanja langsung yang dimaksud adalah total belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk

belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja langsung yaitu belanja yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi Pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran Pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Kapasitas keuangan daerah ditunjukkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja.²⁶

Distribusi alokasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung terjadi kesenjangan. Perbedaan ini disebabkan alokasi belanja pemerintah yang dikeluarkan melalui belanja publik kurang menyentuh masyarakat. Idealnya, distribusi dana ke dalam pos-pos anggaran harus dapat memenuhi kebutuhan publik terhadap sarana dan prasarana umum. Pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Lampung sangat berfluktuasi untuk setiap tahunnya dan cenderung meningkat namun Pendapatan Asli Daerah yang berbeda menjadi sebab kurang optimalnya pengeluaran belanja publik untuk program-program pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

²⁶ Ilyas, Marzuki. 1989. *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

1) Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran Pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*. *Transfer payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

1) **Teori Rostow dan Musgrave**

Dari teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menjelaskan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahapan awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi memiliki peran terbesar dalam penyediaan sarana, prasarana,serta infrastruktur. Pada tahap menengah peran investasi pemerintah tetap memiliki peran yang penting, dimana investasi pemerintah berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas, dan peran swasta juga semakin besar. Dan pada tahap lanjutan investasi pemerintah beralih dari penyediaan infrastruktur atau sarana serta prasarana ekonomi menjadi aktifitas layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur sosial lainnya²⁷

2) **Teori Peacock dan Wiseman**

Pada teori ini didasari pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin besar pula. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar pula.

²⁷Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2006), h.169.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu masyarakat dapat menyadari serta memahami tingginya ketentuan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2) Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran Pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

c. **Pengeluaran Pemerintah Dalam Prespektif Islam**

Telah dijelaskan diatas bahwasanya pengeluaran pemerintah merupakan bentuk dari kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal sendiri terkait kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Di samping kebijakan ekonomi yang lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan, kebijakan fiskal diperlukan untuk mengkoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Kebijakan fiskal yang terutama digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi mencakup langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk mengurangi naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dan untuk menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak adanya masalah inflasi, dan selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ada. Kebijakan fiskal sudah dipraktekan sejak awal terbentuknya masyarakat muslim sejak zaman Rasulullah

dan Khulafur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1332-1406) beliau berpandangan bahwa dalam satu kondisi untuk menyeimbangkan ekonomi pemerintah perlu mengecilkkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah diilustrasikan oleh Ibn Khaldun sebagai pasar terbesar. Dalam konsep islam, kebijakan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yakni meniggalkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Kebijakan fiskal lebih memegang peran penting dalam sistem ekonomi islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneer. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang mengeluarkan zakat menyisaratkan tentang pentingnya kedudukan fiskal dibandingkan dengan moneter.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi bagi setiap individu. Namun pada realitanya, nampak terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada al-Qur'an, yakni agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Untuk itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam menekankan pada penghapusan sistem bunga (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu.

Surat Al-Ma'idah (5) Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain itu, masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan waris, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Kemudian, yang tidak kalah penting dalam kebijakan distribusi adalah dengan mengoptimalkan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Tenaga Kerja

a. Pengertian Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁸

Menurut DR Payaman Siamanjuntak tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.²⁹

²⁸ Undang Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang tenaga kerja

²⁹ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Citra, 1998), h.3

b. Teori Tenaga Kerja

1. Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berbeda dengan permintaan barang dan jasa, konsumen membeli barang karena barang tersebut memberikan kegunaan (*Utility*), akan tetapi pengusaha meminta seseorang sebagai tenaga kerja adalah untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Dengan kata lain, permintaan tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan konsumen dan perusahaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk diperkerjakan. Kebutuhan akan tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian dapat dilihat dari kesempatan kerja (orang yang telah bekerja) dari setiap sektor.³⁰ Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi.³¹

1. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga perunit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu menngurangi konsumsi

³⁰ Fordeby, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 233-234.

³¹ Br Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 205

atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan, penurunan tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

- b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka perusahaan ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainlain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja.³²

1. Naik turunnya permintaan akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya serta menambah penggunaan tenaga kerja.
2. Harga barang-barang modal, apabila harga barang-barang modal turun, tentu mengakibatkan pula harga jual perunit barang akan turun. Pada keadaan ini, produsen cenderung untuk meningkatkan produksinya karena permintaan bertambah besar, karena peningkatan produksi barangnya keadaan ini akan membuat perusahaan menambah penggunaan tenaga kerja. Perusahaan memperkerjakan tenaga kerja karena tenaga kerja itu membantu memproduksi

³² Ibid, h. 206.

barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Didalam pasar pengusaha disebut *price taker*, sebab seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga dan tidak dapat merubah harga dengan menaikkan atau menurunkan produksinya. Perusahaan dapat menjual outputnya sesuai dengna harga yang berlaku, sedangkan dalam memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan.

2. Teori Penawaran Tenaga Kerja

Pertumbuhan tenaga kerja di tentukan oleh pertumbuhan penduduk, dimana penduduk merupakan sumber pokok bagi penawaran tenaga kerja. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak pasti memiliki jumlah angkatan kerja atau penawaran tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yg sedikit. Penawaran tenaga kerja mencakup semua orang yang mempunyai pekerjaan ditambah jumlah mereka yang secara aktif mencari pekerjaan. Jumlah yang bekerja dan yang mencari pekerjaan dinamakan angkatan kerja.³³

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan tertentu. Misalnya, apabila upah sebagai programer komputer naik relatif tinggi dari upah jenis jabatan lain (karena kebutuhan yang meningkat), maka dapat diduga bahwa tendensi untuk menjadi programer akan meningkat pula. Sebetulnya penawaran tenaga kerja di pengaruhi oleh keputusan seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan ini juga tergantung pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja, apakah digunakan untuk kegiatan lain yang

³³ Fordebi, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam...*, h. 236-237.

bersifat lebih santai (tidak produktif tetapi konsumtif) atau merupakan kombinasi keduanya. Apabila diakitkan dengan upah maka keputusan seseorang untuk bekerja dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya, apabila penghasilan tenaga kerja relatif tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja.³⁴

c. Klasifikasi Tenaga Kerja

Menurut DR Payaman Siamanjuntak tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja menurutnya hanya dibedakan oleh batasan umur.³⁵ Konsep Tenaga Kerja yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia. Berdasarkan konsep tersebut klasifikasi tenaga kerja adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Usia Kerja adalah penduduk yang menggunakan batas bawah usia kerja 15 tahun dan tanpa batas atas usia kerja.
- b. Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan
- c. Bekerja adalah sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi

³⁴ Br. Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia...*, h. 208-209.

³⁵ Sendjun H Manululang, "*Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*", (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), h. 3.

³⁶ Mudrajad Kuncoro, *Opcit*, h. 63-64

- dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya.
- d. Bukan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
 - e. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Pengangguran dengan konsep tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka.

d. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut imam syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan allah untuk menutupi kebutuhan manusia.³⁷

Islam mendorong umatya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nahl (16) ayat 97 :

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا عَمَلُونَ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتِ

³⁷ Nurul Huda Et.Al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana,2008),h.227

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Menurut Hasan, tenaga kerja dalam islam adalah tenaga kerja yang dimiliki nilai positif yaitu Bekerja keras dengan ikhlas dan mencintai pekerjaannya, Hidup tertib dan penuh disiplin, Menjalin ukhuwah islamiyah dan suka berjamaah, Berlaku jujur, Pandai bersyukur, Memuliakan mitra, Memaksimalkan ikhtiar dan doa, mampu mengembangkan potensi diri, menepati janji, taat beribadah, istiqomah menghindari kemungkar, bekerja dengan tulus, bersahabat dengan lingkungan, suka belajar dari pengalaman, menganut pola hidup hemat, berlaku amanah, dan percaya diri.³⁸

4. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masyarakat pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang.³⁹

Menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.⁴⁰

³⁸ Hasan Aedy, *Etika Dan Bisnis Islam Teori Dan Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h.46

³⁹ Amri Amir, “*analisis Pertumbuhan Ekonomi, investasi, dan Inflasi di Indonesi*”, *JurnalKajian Ekonomi*, Vol 1, No. 02 Januari 2013, h. 15.

⁴⁰ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi pertama, Cetakan Pertama (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 123

Menurut Tarigan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor- faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.⁴¹

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harrod-Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam Pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:⁴²

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal akan berhasil apabila sebagian pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar *output* dan penghasilan dikemudian hari.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pada akhirnya membedakan lapangan kerja yang lebih luas lagi serta perlu adanya kesempatan kerja yang lebih banyak.

⁴¹ Devi Retnosari, Op cit, h. 11

⁴² Asti Oktari, “Pengaruh Tingkat Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Raden Intan, Lampung, 2016), h. 23-24

- c. Kemajuan teknologi adalah hasil cara-cara yang baru, yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional.

Harrod-Domar mempertahankan pendapat para ahli ekonomi terdahulu yang menanamkan tentang peranan pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar memperhatikan fungsi dari pembentukan modal dan tingkat pengeluaran masyarakat. Menurut Harrod –domar pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah, dan pertumbuhan ekonomi tercapai, apabila pengeluaran masyarakat bertambah. Analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan panjang kemampuan masyarakat yang bertambah dari masa ke masa.⁴³

Simon Kuznet menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada Negara maju dalam jangka panjang.⁴⁴ pertumbuhan kapasitas produksi di dasarkan pada perkembangan teknologi, pembangunan insitusi/kelembagaan, sikap dan teknologi. Kunznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu Negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya”. Berdasarkan teori tersebut dapat di katakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan barang produksinya mencerminkan pula perekonomian yang baik di suatu daerah tersebut. Mendorong pertumbuhan produk perkapita sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,

⁴³ Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M. Ec., *Teori-teori pembangunan ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 62-63

⁴⁴ Dion Syahrullah, *Analisis pengaruh produk domestic regional bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten* (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2014

Jika masyarakat mampu menghasilkan barang-barang ekonominya sendiri maka *volume* produksi di suatu daerah akan meningkat. hal ini berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah tersebut sehingga dapat meminimalisir kemiskinan di suatu wilayah.

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Mankiw berkata bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Menurut Saggaf dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada.⁴⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain:⁴⁶

- a. Sumber daya alam
- b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Sistem sosial
- e. pasar

⁴⁵ Rahardjo Adisasmita, *pertumbuhan wilayah dan wilayah pertumbuhan* (Yogyakarta, graha ilmu, 2014), h.91

⁴⁶ *Ibid*, h. 24

c. **Pertumbuhan Ekonomi Menurut Ekonomi Islam**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Ditinjau dari sejarah pada zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul mal.

Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafau ar-Rasidin dengan mengeluarkan dana Baitul mal. Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang melakukan aktifitas- aktifitas ekonomi:

1. Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
2. Mensejahterakan keluarga.
3. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera Islam adalah sebagai berikut:

1. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
2. Meningkatkan stabilitas nilai *riil* uang.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.

4. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.
5. Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.⁴⁷

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan Pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang di alami oleh faktor produksi tidak di anggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti yang memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.⁴⁸

5. Kesenjangan Ekonomi

a. Pengertian Kesenjangan Ekonomi

Menurut Mudrajad Kuncoro, kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat.⁴⁹ Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Menurut Hipotesa Neo Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan

⁴⁷ Lalu Muhammad Iswandi, *Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*, (NTB, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, 2013) h. 374 - 376

⁴⁸ Ibid, h. 376

⁴⁹ Lyra Bumantara Syarif, “*Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah*”, tersedia di: [https://www.scribd.com/doc/147273102/Summary-Pendapat-Ahli-Ttg-Penyebab-Ketimpangan-Wilayah](https://www.scribd.com/doc/147273102/Summary-Pendapat-Ahli-Ttg-Penyebab-Ketimpangan-Wilayah-(on-Line)), (on-Line) tanggal 10 April 2018.

terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.

Teori ketimpangan dan disparitas antar wilayah dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson yang menganalisa distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional pada suatu negara, ternyata dijumpai dalam suatu negara terdapat suatu wilayah berpendapatan tinggi yang selalau diikuti sekelompok wilayah berpendapatan menengah dan rendah.⁵⁰ Bila perbedaan antara yang berpendapatan perkapita tinggi dan yang rendah sangat besar maka terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dalam tahapan awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi nampak lebih merata diantara wilayah-wilayah, tetapi dalam tahap lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi antar wilayah menampakkan perbedaan yang semakin bertambah besar, yang berarti disparitas antar wilayah bertambah besar.

b. Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah

Hasil studi Kuncoro menyimpulkan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: kecenderungan peranan modal (*investor*) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti: prasarana perhubungan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil, disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara akan menyebabkan tingkat kesenjangan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang yang mana bila hal ini terus dibiarkan maka akan menyebabkan tingkat kesenjangan yang akan semakin meluas. Tentunya juga akan menyebabkan pula

⁵⁰ rof. Dr. Rahardjo Adisasmita, "Teori-Teori Pembangunan Ekonomi", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h..76

tingkat kesejahteraan penduduknya secara umum akan timpang hal ini disebabkan perbedaan tingkat PDRB per kapita yang dimiliki masing-masing wilayah tidak sama.

Menurut teori Neo Klasik ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut dapat mencapai keseimbangan kembali dengan sendirinya, karena daerah-daerah tertinggal akan dengan sendirinya memusat (*konvergen*) dengan daerah yang lebih maju.

Para ekonom Neo Klasik seperti Solow, Swan dan Meade mengajukan model dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. *Full employment*;
2. Persaingan sempurna;
3. Komoditi homogen;
4. Ongkos transportasi nol;
5. Penambahan faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh antar wilayah (*Constant return to scale*);
6. *Supply* tenaga kerja tetap;
7. Tingkat teknologi tetap.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka tingkat upah merupakan fungsi langsung dari rasio kapital dan tenaga kerja, sehingga akan terjadi pergerakan tenaga kerja dari daerah yang tingkat upahnya rendah ke daerah yang tingkat upahnya tinggi, sementara modal bergerak sebaliknya.⁵¹

c. Kesenjangan Ekonomi Menurut Ekonomi Islam

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis

⁵¹ Budiantoro Hartono, Op. Cit. h. 30.

keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Mustafa E Nasution menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara- negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.

Sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Ada tiga instrumen dalam mengurangi perbedaan kekayaan masyarakat, yaitu:

- a. Parameter Positif atau wajib (*Positive Measure*) yang terdiri atas zakat dan *faraid* (waris). Parameter ini untuk menjamin aliran minimal kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang kurang mampu.
- b. Parameter Sukarela (*Voluntary Measure*) yang terdiri dari infaq, sedekah dan wakaf. Instrumen ini mampu mendorong lebih terdistribusinya aset dan kekayaan di masyarakat sehingga Voluntary Measure bisa menjadi alternatif pendanaan pembangunan daerah.
- c. Parameter Larangan (*Prohibitive Measure*) yang terdiri dari larangan riba dan kezaliman ekonomi. Instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah praktik-praktik kezaliman ekonomi, seperti penipuan, riba dan penimbunan. Instrumen ini dapat menyebabkan distorsi dan ketidak seimbangan pasar, sehingga membahayakan stabilitas perekonomian. Akibatnya, peta kekayaan akan menunjukkan konsentrasi pada golongan tertentu dan

menciptakan jurang kesenjangan yang semakin dalam dan melebar.⁵²

Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak sekali ayat Al-Quran dan al-Hadits yang memerintahkan manusia menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan. Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah SWT berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (QS. Al-Hasyr: 7)

Munthe dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya

⁵² Dr. Irfan Syauqi, “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 46.

kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.⁵³ Isu-isu ketimpangan pendistribusian pendapatan dan kekayaan di Indonesia, kritik terhadap distribusi dalam ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan telaah terhadap distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.

Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan. tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah- langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah agar kesejahteraan masyarakatpun terpenuhi.⁵⁴

B. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor yang sangat penting dalam kesenjangan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi.

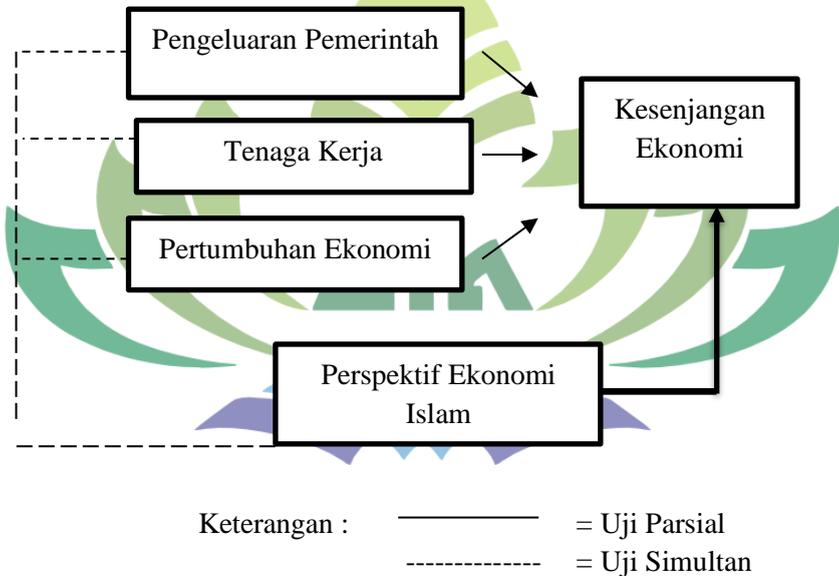
⁵³ Marabon Munthe, "*Konsep Distribusi Dalam Islam*". Jurnal Ekonomi Syariah STEI Annisa Pekanbaru, (2014) Vol. 2, No. 1, h. 71-79.

⁵⁴ Anita Rahmawati, "*Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*". Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, (2013), h. 7-8.

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam membaca perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik memungkinkan kesenjangan ekonomi menurun.

Dengan demikian faktor-faktor yang dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi atau orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dari masyarakat dimana permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan jugab tingkat upah.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 1.4:



Gambar 1.4
Kerangka Pikir

2. Hipotesis Penelitian

1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi

Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur

perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah lebih berkaitan erat dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dimana secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan-pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional, menekankan pengaruh pengeluaran pemerintah baik belanja barang maupun investasi pemerintah, yang disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Manuaba, B.P yang mengatakan terdapat hubungan positif dan nyata antara pengeluaran pemerintah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung.

2) Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kesenjangan Ekonomi

Menurut Rangga Satria Rahadiansyah yang melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2013”, Hasil penelitian membuktikan bahwa

variabel tenaga kerja berpengaruh negatif secara statistik, Koefisien regresi variabel tenaga kerja memberikan tanda negatif yang berarti semakin meningkat tenaga kerja akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh tenaga kerja terhadap kesenjangan ekonomi dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Tenaga Kerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung.

3) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan tersebut. Apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika sebagian kecil orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Sebaliknya jika sebagian besar yang turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil.

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Kuznet dalam Soekirno yang mengatakan bahwa proses pembangunan ekonomi suatu negara pada tahap awal umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, dan baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih baik pada tahap pembangunan lebih lanjut.

Dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat, selanjutnya akan menurun yang dikenal dengan hipotesis U terbalik.

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarteja Tahun 2013 yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat disparitas hasil pembangunan. Tetapi penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Noegroho dan Soelistianingsih yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap disparitas pendapatan.

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh tenaga kerja terhadap kesenjangan ekonomi dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung.

4) Pengaruh Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal. Semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut.

Alokasi investasi yang tidak seimbang pada kabupaten/kota akan sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena semakin tinggi investasi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Besarnya investasi di setiap daerah akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada kesenjangan pendapatan masyarakat. Investasi yang tinggi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesenjangan

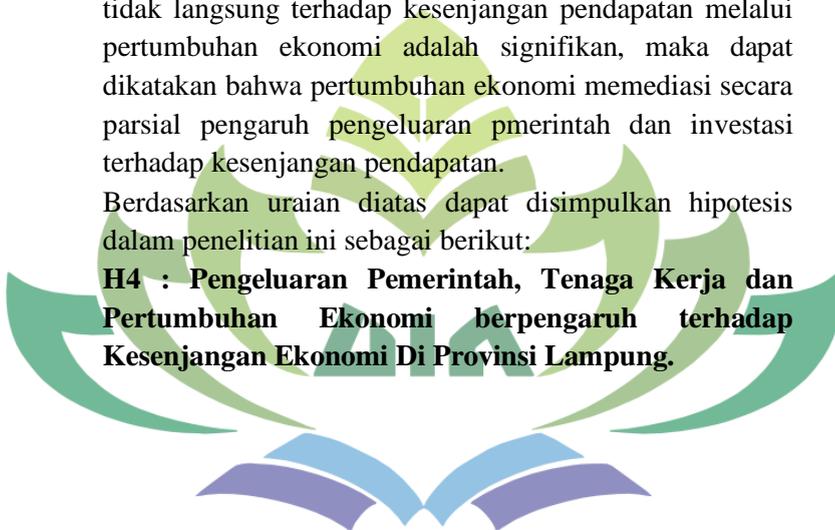
pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional. Pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua wilayah. Pada tahap awal, proses pembangunan cenderung terkonsentrasi dan terpolarisasi pada area pusat suatu wilayah.

Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi secara tidak langsung terhadap kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi secara parsial pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesenjangan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4 : Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kesenjangan Ekonomi Di Provinsi Lampung.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Aedy, H. (2011). *Etika dan Bisnis Islam Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Adisasmita, Rahardjo, *Teori-teori pembangunan ekonomi*, 2013, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Arsyad, Lincolin, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, (Edisi ke-5), Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Alam S., *Ekonomi*, (Jakarta: Essis, 2007), h. 25
- Anton Bawono dan Arya Fendha Ibnu Shina, *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2018).h. 56
- Dr. Irfan Syauqi, “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 46.
- Drs. Bambang Prishardoyo, M. Si., *Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 41
- Fordeby, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 233-234.
- Hasan Aedy, *Etika Dan Bisnis Islam Teori Dan Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 46
- Ibid, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 update PLS Regresih*. 52
- Ilyas, Marzuki. 1989. *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regres* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).h.224
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).h.43
- Iswandi, Lalu Muhammad, 2013, *Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*, NTB, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim
- Jusuf Amir Faesal, *Riorientasi pendidikan islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Lalu Muhammad Iswandi, *Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*, (NTB, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim,2013) h. 374 -376
- Madnasir, 2010, *Distribusi Dalam Islam*,*Jurnal Ekonomi Islam*, Lampung
- Manululang, Sendjun H, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*,Jakarta: PT Rineka Citra
- Mudrajad Kuncoro, *Indikator Ekonomi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 97
- Nugroho, Iwan & Rochim Danuri, 2004, *Pembangunan Wilayah Persepektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Nurul Huda Et.Al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana,2008),h.227

- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Penada Media Grup
- Nurachmad, Much, 2012, *Cara Menghitung Upah pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun*, Jakarta: Visi Media
- Pracoyo, Tri Kunawaningsih dan Antyo Pracoyo, 2006, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta : Grasindo
- Prishardoyo, Bambang, 2012, *Ekonomi*, Jakarta: Grasindo
- Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M. Ec., *Teori-teori pembangunan ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 62-63
- Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, “*Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h..76
- Rahardjo Adisasmita, *pertumbuhan wilayah dan wilayah pertumbuhan* (Yogyakarta, graha ilmu, 2014), h.91
- Rahmawati, Anita. ”*Membangun sistem distribusi perspektif ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Islam, Kudus.
- Rasul, Agung Abdul, 2010, *Praktikum Statistika Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta , Mitra Wacana Media*
- Ronald E.Walpole, *Pengantar Statistika* (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 2-5
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2006), h.169.
- Sauqi, Irfan, 2016, *Ekonomi pembangunan syariah*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada

- Samuelson, Paul A dan William D.Nordhaus.1996. *Makro Ekonomi* (terjemahan). Edisi keempat belas, Erlangga,Jakarta.
- Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), h.3
- Setiadi, Usman Husnaini, 2003, *Pengantar Statistika*, Jakarta: PT. Bumi Aksara Soehartono, Irawan, 1995, *Penelitian Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2014, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi*, Bandung :Alfabeta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 11.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173.
- Sukirno,S, 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2013, *Mikro ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Supranto, 2008, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi ketujuh, Jakarta: Erlangga
- Tarigan, Robinson, 2014, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Jakarta:PT. Bumi Aksara

Tika, Moh. Prabundu, 2006, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara

Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ketujuh Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Widarjono, Agus, 2016, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIMYKPN

Jurnal

Anita Rahmawati, “*Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*”. Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, (2013), h. 7-8.

Amri Amir, “*analisis Pertumbuhan Ekonomi, investasi, dan Inflasi di Indonesia*” , Jurnal Kajian Ekonomi, Vol 1, No. 02 Januari 2013, h. 15.

Arifianto, Wildan dan Imam Setiyono, 2012, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia*”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Surabaya.

Asti Oktari, “*Pengaruh Tingkat Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Raden Intan, Lampung, 2016), h. 23-24
Chusna, Arifatul, 2013, “*Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2011*”.(Skripsi Unnes)

- Dion Syahrullah, *Analisis pengaruh produk domestic regional bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten* (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2014
- I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukasa dan Nyoman Yuliasmi, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014" , E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.3 No8 (2014) h. 7
- I Komang Oka Artana Yasa dan Sudarsana Arka, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali", Vol. 8 No.1, (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 2015), h. 70
- Kristanto, 2014, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012".(Skripsi Ekonomi Pembangunan. Univesitas Dipenogoro).
- L. Suzana, Benu Olfie dan Gene H. M. Kapantow, "Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara". Jurnal Ekonomi, 2015
- Lina Maulina Syarifudin, "Identifikasi Sektor Basis dan Ketimpangan Pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung tahun 2009-2013", Skripsi Ekonomi Pembangunan, (Universitas Lampung, Lampung, 2015), h. 53

- Lyra Bumantara Syarif, “*Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah*”, tersedia di: <https://www.scribd.com/doc/147273102/Summary-Pendapat-Ahli-Ttg-Penyebab-Ketimpangan-Wilayah>, (on-Line) tanggal 10 April 2018.
- Marabon Munthe, “*Konsep Distribusi Dalam Islam*”. Jurnal Ekonomi Syariah STEI Annisa Pekanbaru, (2014) Vol. 2, No. 1, h. 71-79.
- Maryam Yuliani, “*Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan*”. Skripsi Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro, 2010. H.4
- Merri Anitasari, Ahmad Soleh, “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 3 No. 2 (2012): 112-127, htt Alam S., Ekonomi, (Jakarta: Essis, 2007), h. 25
- Munthe, Marobana, 2014, “*Konsep distribusi Dalam Islam*”, Vol. 2 no. 1, (jurnal ekonomi syariah, STEI Iqra Annisa Pekanbaru)
- Muhammad Nasir, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan tingkat Pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011*”, Skripsi Ekonomi Pembangunan, (Universitas Lampung, Lampung, 2013), h. 51
- Nugroho.Purwo, 2014, “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan Di kabupaten Demak Tahun 2008-2010*”. (Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Diponogoro)
- Nurlaili.Ani, 2016, “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun*

2007-2013".(Skripsi Pendidikan ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta)

Oktari, Asti, 2016, "*Pengaruh Tingkat Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan Lampung)

Okta Ryan Pranata Yudha, "*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan tingkat Pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011*", Skripsi Ekonomi Pembangunan, (Universitas Negeri Semarang, , Semarang, 2013), h. 72

Putra, Linggar Dewangga, 2007, "*Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah penduduk Miskin di Jawa Tengah Periode 2000-2007*", (Jurnal Ekonomi, Jawa Tengah).

Purwo Nugroho "*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan Demak Tahun 2008-2010*".(Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Diponegoro, 2014). H.12

Rochmawati, Vera. , "*Pengaruh Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Pusat Koperasi Polisi Daerah Jawa Barat*", (Universitas Pendidikan Indonesia). Repository UPI edu

Rahardiansyah, RanggaSatria, 2015, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembanguna Ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013*".(Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universita Lampung)

- Retnosari, Devi, 2006, “*Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*”. (Skripsi Ilmu Ekonomi, Bogor)
- Riadi, “*Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah di Provinsi Riau*”, *Jurnal pendidikan Ekonomi*, Riau
- Sri Danawati, IK.G. Bendesa dan Made Suyana Utama,” *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016*”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol.5 No7(2016) h. 28
- Sungkar, Sari Nurmalisa, 2015, “*Pengaruh Upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia*”, Volume 3, No. 2, Mei 2015 (*Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, Universitas Syiah Kuala)
- Syarif, Lyra Bumantara, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah*”, tersedia di: [https://www.scribd.com/doc/147273102/Summary-Pendapat-Ahli-Ttg Faktor-Penyebab-Ketimpangan-Wilayah](https://www.scribd.com/doc/147273102/Summary-Pendapat-Ahli-Ttg-Faktor-Penyebab-Ketimpangan-Wilayah) (on-Line) tanggal 24 Mei 2017
- Sulistiawati, Rini, 2012, “*Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*”, (*Jurnal Ekonomi Social* Vol.8 No.3)
- Utami, Ratri Heningtyas , 2013, “*Pengaruh Tenaga kerja, Upah Minimu Regional (UMR), pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Kedung Sepur*”, (Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang)

Yasa, I Komang Oka Artana, ” *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali*”, Vol. 8 No.1, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana)

Yuliani, Maryam, 2011, “*Keterkaitan Antara Pertumbuhan ekonomi dan Distribusi Pendapatan*”. (Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Diponegoro)

